Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Reklamasi untuk Cegah Banjir

Pemprov DKI Jakarta mengklaim draf revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Nomor 1 Tahun 2014 sudah diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta. Payung hukum itu diperlukan sebagai landasan untuk perluasan Kawasan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara seluas 155 hektare.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, saat ini draf tersebut sedang diproses oleh DPRD DKI Jakarta. Rencananya, Raperda tersebut akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. "Prinsipnya kami akan merevisi Perda terkait reklamasi Ancol Timur," kata Ariza, Senin (20/7).

Ariza menyatakan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menolak segala reklamasi yang dianggap merugikan warga Jakarta. Namun reklamasi Ancol ini, kata dia, sebetulnya sudah dilakukan sejak 2009 dan bertujuan untuk mencegah banjir di Ibu Kota. Saat ini luas lahan hasil reklamasi yang sudah ada di Kawasan Ancol mencapai 20 hektare, dan itu diperoleh dari kerukan kali, waduk, dan sungai yang ada di Jakarta. Politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, reklamasi yang ada di Ancol merupakan warisan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

"Dulu tanah sedimentasi yang mulai dikeruk dari 13 sungai dan lima waduk besar di Jakarta. Sekarang ada 30 waduk lagi yang perlu dikeruk, dan dicarikan tempatnya buat Ancol," ujar Ariza. Selain draf Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi, DKI juga telah mengajukan Rancangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Adapun Raperda RZWP3K ini sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di DPRD DKI Jakarta 2020. **(faf)**